

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Dinamika Antara Proses Pembodohan, Demokrasi, dan Administrasi Publik (Perspektif Teori Administrasi Dalam Menghadapi Ancaman Terhadap Konsolidasi Demokrasi)

Anni Yuliah^a dan Achmad Sodik Sudrajat^b

^{a,b} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^b achmad.sodik@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak proses pembodohan terhadap demokrasi dan bagaimana teori administrasi dapat memberikan wawasan dalam menghadapi masalah ini. Dalam bagian pendahuluan, kita akan menyajikan pandangan awal tentang konsep pembodohan, dengan penekanan pada aspek korupsi, dalam konteks demokrasi. Selanjutnya, artikel ini akan memeriksa lebih mendalam tentang bagaimana proses pembodohan, termasuk praktik korupsi, dapat mengancam tatanan demokrasi, dan bagaimana teori administrasi publik dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut. Artikel ini menyoroti pentingnya administrasi publik yang efektif dan akuntabel sebagai elemen kunci dalam menjaga kesehatan demokrasi. Administrasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik-praktik korupsi dan pembodohan lainnya yang dapat merusak fondasi demokrasi. Dengan memperkuat prinsip-prinsip administrasi publik, kita dapat memastikan bahwa negara tetap berfungsi dengan baik, menyediakan layanan yang adil dan berkualitas kepada warga negara, serta menjaga integritas demokrasi. Kesimpulannya, artikel ini menggarisbawahi pentingnya administrasi publik yang kuat dalam menjaga demokrasi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang muncul dalam upaya memerangi pembodohan dan korupsi.

Kata Kunci: *Konsolidasi Demokrasi, Administrasi Publik, Perspektif Teori Administrasi.*

The Dynamics Between Ignorance, Democracy, and Public Administration: An Administrative Theory Perspective on Countering Threats to Democratic Consolidation

Abstract

This article aims to explore the impact of the deception process on democracy and how public administration theory can provide insights into addressing this issue. In the introduction, we present an initial overview of the concept of deception, with a focus on corruption, in the context of democracy. Subsequently, the article delves deeper into how the deception process, including corrupt practices, can undermine the democratic framework, and how public administration theory can be an effective instrument in tackling these challenges. The article highlights the

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

significance of effective and accountable public administration as a key element in maintaining the health of democracy. Good administration can help identify, prevent, and address corrupt practices and other forms of deception that can erode the foundations of democracy. By strengthening the principles of public administration, we can ensure that the state functions effectively, provides fair and quality services to citizens, and upholds the integrity of democracy. In conclusion, this article underscores the importance of a strong public administration in preserving sustainable democracy and addressing the challenges that arise in combating deception and corruption.

Keywords: *Democratic Consolidation, Public Administration, Administrative Theory Perspective.*

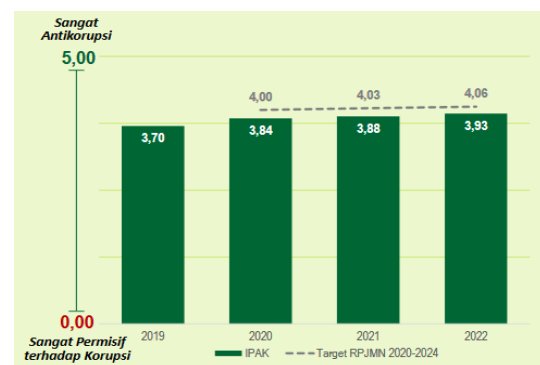
A. PENDAHULUAN

Pembodohan sebagai ancaman terhadap demokrasi dilihat dari proses pembodohan yang telah menjadi salah satu tantangan yang akan merusak tatanan demokrasi, sehingga konsep pembodohan merupakan ancaman yang dapat mengikis nilai-nilai esensial demokrasi. Proses pembodohan mencakup penyebaran informasi yang salah, manipulasi fakta, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lembaga-lembaga demokratis.

Ketika masyarakat diberikan informasi yang salah atau disinformasi, proses pengambilan keputusan yang demokratis menjadi terganggu. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis dan representasi politik dapat terkikis, mengarah pada potensi partisipasi yang berkurang. Administrasi publik memiliki peran kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam demokrasi.

Korupsi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pembodohan, karena korupsi merugikan dengan memanipulasi aliran dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengancam prinsip akuntabilitas dan transparansi. Contoh potensi negatif dari korupsi ini dengan adanya indikasi penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik, namun diarahkan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebagai ukuran tingkat perilaku anti

korupsi masyarakat dengan skala 0-5 pada level nasional, diperlihatkan pada tabel berikut:



Gambar 1. Perkembangan IPAK 2020-2022

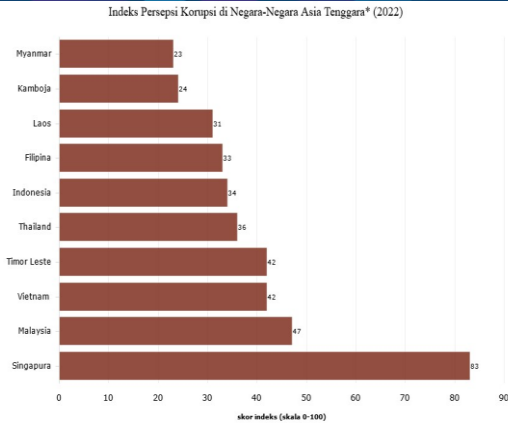
Berita Resmi Statistik No. 59/08/Th. XXV, pada tanggal 1 Agustus 2022 memperlihatkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, yang lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 (3,88). Nilai indeks ini meskipun mengalami kenaikan dan gapnya mengecil, namun capaian IPAK masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yaitu 4,06. Sumber ini juga merincikan bahwa IPAK yang terdiri dari Dimensi Indeks Persepsi mengalami penurunan, sedangkan pada Dimensi Indeks Pengalaman mengalami peningkatan yang disebabkan turunnya proporsi masyarakat yang membayar melebihi ketentuan.

Laporan *Transparency International*, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara, seperti terlihat pada gambar berikut.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung



Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara (2022)

Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, diunduh tanggal 30/08/2023

Laporan *Transparency Internasional* Tahun 2023 menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. IPK Indonesia pada Tahun 2022 menempati peringkat ke-110, yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menghimpun sejumlah kerugian negara berdasarkan sektor kasus korupsi selama 2022 lalu. Kerugian negara terbesar adalah kasus korupsi sektor perdagangan yang nilainya hingga Rp20,9 triliun. Secara kuantitas kasus, sektor ini menyumbang 10 kasus pada 2022.

Pembodohan sebagai ancaman terhadap demokrasi dan mengidentifikasi kebutuhan akan pendekatan administrasi publik yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Persoalan pada artikel ilmiah ini menyuguhkan pandangan awal tentang konsep pembodohan, dengan fokus pada korupsi, dalam konteks demokrasi. Bahkan pada level pemerintah terkecil seperti Desa, Kebijakan tentang pemilihan Kepala Desa masih dipandang rentan dalam potensi munculnya

korupsi (Mulyadi dan Maulana, 2022). Menariknya bahwa hal ini juga terkmaktub dalam peraturan daerah ketika otonomi daerah gencar dicanangkan dan dilaksanakan (Sudrajat, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan Firmansyah dan Syam (2021) menunjukkan bahwa lemahnya hukum administrasi negara sering menimbulkan peluang terjadinya praktik korupsi, dengan mengajukan saran berupa upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan dengan penguatan hukum administrasi negara melalui optimalisasi birokrasi. Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Rahman (2022) memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi masih tinggi pada birokrasi pemerintahan Indonesia meskipun upaya reformasi birokrasi pemerintah Indonesia telah dilakukan dan saat ini lebih baik, namun di tingkat pemerintah daerah masih perlu menjadi perhatian utama karena selain tingkat korupsi yang tinggi, indeks reformasi birokrasi di pemerintah daerah masih cukup rendah. Selain itu perlu pemahaman penting tentang pengelolaan risiko pada sektor publik terutama pemerintah desa (Taufik et al., 2022), sehingga dapat mendorong tingkat akuntabilitas desa (Mulyadi dan Maulana, 2021) serta kesejahteraan masyarakat (Wijayanti dan Taufik, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara proses pembodohan, termasuk dalam konteks korupsi, dan demokrasi serta menguraikan bagaimana teori administrasi publik dapat menjadi landasan dalam mengatasi masalah ini. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana proses pembodohan, termasuk praktik korupsi, dapat merusak tatanan demokrasi dan bagaimana teori administrasi publik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu pandangan holistik ditawarkan dalam menghadapi ancaman terhadap konsolidasi demokrasi dengan menggabungkan perspektif teori administrasi dan permasalahan pembodohan dalam konteks korupsi.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Keterkaitan antara proses pembodohan, demokrasi, dan teori administrasi publik ini, digunakan perspektif teori administrasi untuk membahas bagaimana konsep administrasi publik, termasuk manajemen publik dan akuntabilitas, dapat digunakan dalam menghadapi tantangan pembodohan dan memastikan kelangsungan demokrasi yang kuat, yang menggarisbawahi peran administrasi publik dalam menjaga integritas demokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.

B. PEMBAHASAN

Keberlanjutan Pembangunan melalui Administrasi Publik yang Efektif

Administrasi yang efektif dan akuntabel dapat mempromosikan keberlanjutan pembangunan, dengan menggunakan prinsip-prinsip administrasi publik, yang berfokus pada upaya untuk mengatasi pembodohan dan menghindari dampak negatifnya terhadap proses demokrasi. Pemerintah yang efektif dan akuntabel memiliki peran vital dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks demokrasi, dengan berupaya untuk mengatasi ancaman pembodohan dan mencegah dampak negatifnya terhadap proses demokrasi.

Pemerintah dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkualitas dan responsif dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi publik yang berfokus pada efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Berikut digambarkan bagaimana pengelolaan yang baik dapat membantu mengatasi ancaman pembodohan dan menjaga integritas proses demokrasi dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.

a. Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya yang Bijaksana

Administrasi publik yang efektif ditandai oleh efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.

Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya dapat membantu menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan praktik pembodohan. Dana publik yang dikelola secara efektif akan dialokasikan dengan cara yang lebih adil dan transparan.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas

Prinsip-prinsip administrasi publik menegaskan perlunya pengalokasian anggaran yang tepat untuk pelayanan publik yang berkualitas. Administrasi yang akuntabel akan memastikan bahwa anggaran yang diberikan oleh publik digunakan secara optimal untuk pelayanan yang bermanfaat. Ini akan mengurangi peluang pembodohan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

c. Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Administrasi publik yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menemukan solusi inovatif untuk tantangan pembodohan. Prinsip-prinsip inovasi dalam administrasi dapat membantu mencegah praktik pembodohan dengan menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan efisien.

d. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan administrasi publik, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan, sehingga pemerintah dapat mencegah pembodohan dan membangun dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

e. Memperkuat Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Administrasi publik yang efektif juga mencakup mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat. Penerapan mekanisme ini dapat mengurangi risiko pembodohan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu dapat diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

Kontribusi Administrasi Publik terhadap Konsolidasi Demokrasi

Peran administrasi publik yang efektif dan berprinsip sangatlah penting dalam menjaga integritas dan menguatkan fondasi demokrasi. Administrasi publik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap konsolidasi demokrasi dengan menyediakan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini menegaskan bahwa administrasi publik dapat menjadi pilar penting dalam memastikan konsolidasi demokrasi yang berdaulat dan kuat. Administrasi publik menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga memberikan kontribusi positif dalam memastikan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan dan mencegah praktik pembodohan yang dapat merusak proses demokratis.

a. Pemberian Pelayanan Publik yang Adil dan Merata

Administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil akan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat. Pemberian pelayanan yang adil akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencegah terjadinya ketidakpuasan yang dapat merusak proses demokratis.

b. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Penerapan prinsip transparansi dalam administrasi publik akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat. Ini akan membantu menghindari rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan

pemerintah yang dapat memicu pembodohan. Transparansi ini mengokohkan integritas demokrasi.

c. Akuntabilitas Pemerintah kepada Masyarakat:

Administrasi publik yang akuntabel akan membantu masyarakat untuk melacak dan menilai kinerja pemerintah. Akuntabilitas membentuk hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dan mengurangi risiko pembodohan.

d. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat:

Pendekatan administrasi publik yang responsif akan memungkinkan pemerintah untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat. Responsivitas ini tidak hanya menghindari pembodohan, tetapi juga memperkuat keterlibatan publik dalam proses demokratis.

e. Mendukung Kualitas Proses Demokrasi:

Administrasi publik secara langsung mendukung kualitas proses demokrasi, dengan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Administrasi publik yang berprinsip dan efektif dapat memainkan peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi, memitigasi risiko pembodohan, dan memperkuat fondasi konsolidasi demokrasi yang berdaulat dan kuat.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Artikel ini membahas dampak pembodohan terhadap demokrasi dan bagaimana teori administrasi publik dapat membantu mengatasi masalah ini. Pembodohan dapat merusak demokrasi dengan mengurangi partisipasi publik, mendorong korupsi, dan merusak integritas pemerintahan. Teori administrasi publik memberikan kerangka kerja relevan untuk mengatasi masalah ini. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

anti-korupsi dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif pembodohan dan membangun pemerintahan yang lebih responsif dan jujur.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas administrasi publik yang efektif dan akuntabel untuk mencegah pembodohan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Masyarakat harus lebih sadar tentang dampak pembodohan, dan program edukasi serta kampanye informasi dapat membantu mereka mengenali praktik merugikan dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam demokrasi. Pemerintah juga harus memastikan keterbukaan informasi dalam administrasi publik, memberikan masyarakat akses yang lebih luas untuk mengawasi tindakan pemerintah dan mengurangi risiko pembodohan.

Membangun mekanisme partisipasi publik yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dapat mencegah pembodohan dan memastikan suara masyarakat diperhitungkan dalam kebijakan publik. Terapkan praktik manajemen anti-korupsi dalam administrasi publik untuk mengurangi potensi korupsi yang berkontribusi pada pembodohan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan terpercaya. Penguatan demokrasi dan penanggulangan pembodohan memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan kompleks dan multidimensional ini.

REFERENSI

- Alisjahbana, A. S. (2018). Menyongsong SDGs: kesiapan daerah-daerah di Indonesia. Unpad Press.
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi dalam Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 594-605.
- Berita Resmi Statistik No. 59/08/Th. XXV, pada tanggal 1 Agustus 2022
- Fahri, M. (2018). Analisis Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Adalah*, 3(I), 29-44.
- Febriani, R., Paselle, E., Hariati, H. (2019). Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 7(3), 9164-9178.
- Firmansyah, V. Z., dan Syam, F., 2021. Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), 325-344.
- Malik, D. E. H., Nurmanto, A., Putra, J. M., Saputro, A. A. (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik: Tinjauan terhadap Proses Pengambilan Keputusan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 1(3), 232-237.
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 - 423. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>.
- Mukarom, Z., Laksana, M. W., (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan I. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Mulyadi, D., Maulana, R. (2022). Policy Evaluation of Village Head Election in Bandung Regency. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science (ICAS 2021)*. DOI 10.4108/eai.15-9-2021.2315255.
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103. <http://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.019>
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi:

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Korupsi dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14 (1), 135-161.
- Satibi, I., 2012. *Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung: Penerbit UNPAS Press.
- Setiawan, I., Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2), 33-50.
- Sudrajat, A. S. (2019). Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 7 (3), 155 -166. <https://doi.org/10.31113/jia.v7i3.304>
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Teguh S., W., Suryadi, F. (2022). Strategi Pencegahan Korupsi melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 8-16.
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEBD)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>